

KEARIFAN LOKAL DAN REALITAS KEBERAKSARAAN PADA PEREMPUAN BURUH PERKEBUNAN

LOCAL WISDOMS AND LITERACY REALITY OF THE FEMALE PLANTATION WORKERS

Khutobah, Misno A.L., Deditiani Tri Indrianti

FKIP Universitas Jember
indrianti_pkp@yahoo.co.id

Abstrak

Fokus kajian penelitian dilatarbelakangi adanya kondisi bahwa perempuan buruh perkebunan merupakan korban pertama dan utama kemiskinan akibat konstruksi sosial budaya. Kondisi tersebut, diakibatkan oleh adanya tingkat pengetahuan perempuan buruh perempuan yang relatif rendah. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan keaksaraan yang mampu memberikan keterampilan mengenalkan huruf dan angka sebagai dasar memperoleh pengetahuan dasar. Namun, pengenalan huruf dan angka tersebut perlu memperhatikan tatanan sosial yang telah melembaga di tingkat lokal.

Kata kunci:

kemiskinan, perempuan buruh, keaksaraan fungsional

A. Pendahuluan

Gerakan pemberantasan buta aksara di Indonesia telah lama dilakukan. Akan tetapi gerakan tersebut masih bersifat parsial dan belum mengakomodasi karakteristik sosial budaya dan tipologi warga belajar. Akibatnya, gerakan pemberantasan buta aksara yang diwujudkan dalam program pendidikan keaksaraan fungsional belum berjalan secara maksimal. Salah satu bukti

menunjukkan bahwa pengalaman selama ini kehadiran warga belajar lebih berorientasi imbalan berupa sembako yang diberikan oleh penyelenggara.

Salah satu kantong penyandang buta aksara yang belum menjadi sasaran utama program keaksaraan adalah masyarakat buruh perkebunan terutama perempuan buruh. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumberwadung, Kabupaten Jember. Kondisi wilayah ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya masih sangat rendah tingkat melek hurufnya. Meskipun demikian negara seringkali lalai dalam memberdayakan komunitas perkebunan. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik komunitas perkebunan yang menjelma menjadi "negara" dalam negara. Semua hajat hidup buruh perkebunan diatur dan ditentukan oleh perusahaan. Semua orang yang beraktivitas harus dalam kontrol dan kendali orang-orang perusahaan. Ketatnya kontrol dan pengawasan tersebut membuat masyarakat perkebunan menjadi sebuah *enclave* tersendiri yang sulit disentuh oleh kelompok luar, termasuk pemerintah.

Padahal dalam masyarakat perkebunan terdapat potensi kelembagaan lokal masyarakat yang lahir dari diinisiasi sendiri dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai wadah dalam menyelenggarakan program keaksaraan fungsional. Menggunakan sarana dengan memanfaatkan kelembagaan masyarakat maka dimungkinkan terjadinya keberlanjutan program yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkebunan khususnya perempuan buruh, guna mewujudkan kesadaran kritis yang bermuara pada kemampuan perempuan untuk melakukan berbagai aktivitas dalam memperoleh berbagai sumber kebutuhan hidup.

Upaya peningkatan kesadaran kritis pada perempuan buruh perkebunan melalui program keaksaraan fungsional belum maksimal apabila mengabaikan karakteristik sosial budaya yang telah melembaga dalam sistem sosial di tingkat lokal. Perhatian ini didasari oleh pertimbangan bahwa, masyarakat perkebunan memiliki tatanan sosial sebagai wujud interkoneksi antara berbagai sendi kehidupan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amin (2005:172), bahwa masyarakat yang mendiami suatu bentang ruang tertentu dengan kelembagaan dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup, semuanya mesti dilihat dari satu kesatuan.

Mengingat, kelembagaan masyarakat terbentuk dari tradisi komunitarian berdasarkan kepentingan kolektif serta memiliki fungsi sebagai sistem

pengendali sosial. Keberadaannya pun lebih bersifat adaptif serta lebih mampu menjawab kebutuhan perempuan buruh perkebunan yang lebih spesifik. Sebagaimana diungkapkan Sugiyanto (2002:59), bahwa lembaga sosial dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) disaat komunitas lokal berada pada kondisi krisis, sehingga dapat menjamin stabilitas kelangsungan hidup masyarakat, terbentuk atas kepentingan kolektif, serta menyediakan peran sosial yang sesuai norma dan karakteristik masyarakat di tingkat lokal, sehingga perempuan bersama laki-laki lebih kritis dan mampu merespon kebutuhan lokal yang dapat memengaruhi kehidupannya tanpa terjadi pengingkaran budaya.

Berdasarkan uraian di atas, tergambar bahwa penanggulangan kemiskinan melalui program keaksaraan fungsional perlu diformulasi berdasarkan potensi kelembagaan di tingkat lokal guna mewujudkan kesadaran kritis perempuan buruh perkebunan. Mengingat, ketidakberdayaan perempuan terjadi akibat ketidakadilan gender di tingkat lokal maupun global yang telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, perempuan memiliki posisi tawar rendah, kultur yang represif, diskriminasi di ruang publik maupun domestik.

Selain itu, melalui program pendidikan keaksaraan fungsional terjadi peningkatan pengetahuan dasar perempuan buruh perkebunan. Dimana pengetahuan tersebut diperlukan dalam melakukan strategi adaptasi dalam menanggulangi kemiskinan. Mengingat program tersebut menekankan pada aspek kesadaran, fungsionalitas, dan fleksibilitas.

B. Pembahasan

Buta aksara dan ketidakberdayaan perempuan buruh perkebunan kopi bukan lagi merupakan fenomena sosial, tetapi merupakan masalah kemanusiaan terkait kemiskinan. Oleh karena itu, perlu kebijakan komprehensif dan menyeluruh yang dilakukan secara regional maupun nasional guna menyelesaikan akar penyebab masalah tersebut. Tujuannya, membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran kritis dan mampu merespon situasi yang berpengaruh sebagai sumber-sumber kelangsungan hidup serta mampu melakukan pembacaan kondisi sosial di sekitarnya. Pembacaan tersebut merupakan instrumen dalam memperbaiki kehidupan perempuan buruh dan masyarakat pada umumnya.

Bagi Freire (dalam Smith, 2001) upaya kesadaran pada akhirnya bermuara pada pembebasan yang diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai sosial budaya,

seperti kesetiakawanan sosial, wawasan kebangsaan, dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program keaksaraan fungsional, sebagai program pemberdayaan yang mengkombinasikan kegiatan belajar, bingarcalistung (berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan berhitung), dan keterampilan fungsional. Dimana tujuan program keaksaraan fungsional dan keterampilan fungsional. Dimana tujuan program keaksaraan fungsional menyupayakan kemampuan pemahaman dan penyesuaian diri guna mengatasi masalah hidup serta membangun masyarakat untuk melakukan perubahan.

Oleh karena itu, program keaksaraan fungsional perlu dilihat, dianalisis, dan dipahami dalam kerangka kesadaran kritis dan berbasis pada kearifan lokal. Perubahan yang ingin dicapai adalah tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Di mana terdapat perubahan dari situasi kehidupan masyarakat parsial menuju kehidupan yang berencana (*planning society*). Menurut Sudjana (2004:279) ciri masyarakat belajar adalah: *pertama*, masyarakat gemar mencari informasi guna memenuhi kehidupannya. *Kedua*, masyarakat gemar menemukan informasi. *Ketiga*, masyarakat gemar menulis dan menyampaikan informasi, dan *keempat* masyarakat gemar melakukan kegiatan belajar secara berkelanjutan atas kesadaran bahwa belajar bagian dari kehidupan, sehingga perlu proses pembelajaran yang responsif dan sesuai dengan konteks sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Posisi dan peran perempuan buruh sebagai aktor penggerak produktivitas perkebunan terbatas, termarginal ataupun asimetris dibandingkan laki-laki. Porsi yang diberikan relatif kecil dan tidak adil. Bahkan, secara khusus perempuan buruh lebih sedikit memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan aktualisasi diri dibanding laki-laki. Secara rinci keberdayaan perempuan buruh perkebunan kopi dapat dikaji dalam beberapa hal berikut.

Pertama, akses, porsi perempuan buruh perkebunan memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan secara besar. Meskipun memiliki potensi tetapi terdapat keterbatasan ruang gerak dalam memperoleh sumber daya yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Kedua, Partisipasi, keterlibatan perempuan buruh perkebunan dalam sektor publik dan domestik belum maksimal.

Ketiga, Kontrol Sosial, perempuan memiliki kontrol sosial lebih kecil dibanding laki-laki untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat.

Keempat, kesetaraan, perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender dalam bentuk berikut. (1) *Stereotype*, yaitu pandangan negatif terhadap relasi gender yang menyebabkan ketidakadilan. (2) Subordinasi, yaitu keyakinan bahwa kedudukan laki-laki dianggap lebih penting dan lebih utama. (3) Marginalisasi, yaitu proses peminggiran dan ketidakadilan perempuan akibat perbedaan jenis kelamin. (4) Kekerasan, yaitu bentuk kekerasan yang tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga menyangkut psikis, sehingga laki-laki atau perempuan mengalami gejala emosional dan ketidaktenangan batin. (5) Beban ganda, yaitu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam menjalankan beban kerja antara laki-laki dan perempuan.

Ketidakadilan atau ketimpangan gender oleh Fakhri (1996:35) disebabkan karena perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat secara biologis (*nature*) tetapi lebih dilihat dari kepribadian yang ditentukan masyarakat (*nurture*), sehingga secara situasional perempuan dianggap sebagai makhluk lemah dan kurang mampu memenuhi kebutuhannya, laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih mampu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penyadaran terhadap perempuan maupun laki-laki guna mengurangi ketidakadilan gender.

Salah satu cara untuk mengurangi ketidakadilan gender tersebut adalah dengan menfungsikan kelembagaan lokal. Fungsi kelembagaan lokal secara ekonomi dapat mempertemukan kepentingan kaum laki-laki dan perempuan terutama yang menyangkut kebutuhan ekonomi. Fungsi kelembagaan lokal lebih jauh dapat dikembangkan menjadi seperangkat institusi sosial yang melembaga sebagai wujud kecerdasan lokal (*local genius*) dalam memenuhi kebutuhan. Sebagaimana dikatakan Sugiyanto (2002:27), bahwa tatanan masyarakat tumbuh akibat tingkahlaku yang diulang guna memenuhi kebutuhan dan melekat pada pola kehidupan masyarakat. Dimana keberadaan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal dapat membangkitkan martabat kaum lemah, menghambat internalisasi ketidakadilan, dan menciptakan berbagai saluran bagi kelompok terpinggir untuk bersuara dan membuat perubahan yang berarti. Oleh karena itu, kelembagaan masyarakat efektif guna meningkatkan keberdayaan perempuan.

Menurut Sugiyanto (2002:38) kelembagaan masyarakat diartikan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dan memiliki anggota yang berkembang secara dinamis melalui dimensi kehidupan masyarakat. Secara abstrak lembaga sosial merupakan peraturan atau norma untuk mengatur persoalan dan perilaku

anggotanya. Koentjaraningrat dalam Soekanto (1990:217), mengatakan lembaga masyarakat sebagai sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kelembagaan masyarakat pada umumnya terbentuk dari ikatan social guna menciptakan kesepakatan sosial yang mengikat.

Oleh karena itu, kelembagaan masyarakat ditingkat lokal penting untuk dipertimbangkan guna dijadikan sarana melakukan penyadaran kepada perempuan buruh perkebunan. Dimana penyadaran dilakukan sebagai awal dalam memberikan kapasitas untuk kemudian didayagunakan guna melakukan akses terhadap berbagai sumber kehidupan. Untuk itu, dalam tulisan ini tergambar pentingnya program keaksaraan fungsional berbasis kelembagaan lokal yang bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan guna menyelesaikan masalah kemiskinan pada masyarakat perusahaan daerah perkebunan kopi. Ketika kompleksitas interaksi sosial dan alam dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan pola fenomenal dan spesifik lokal, sehingga perempuan menjadi manusia kritis dan menjadi lebih peka dalam menghadapi berbagai tekanan social. Oleh sebab itu, kelembagaan lokal menjadi hal yang penting untuk dapat memberikan proses pembelajaran yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sumardi (2011), bahwa dalam program keaksaraan fungsional paling sedikit terdapat dua keterampilan yang harus di perhatikan, dikembangkan dan dimiliki oleh setiap warga belajar, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan fungsional. Keterampilan dasar mencakup keterampilan membaca, menulis, dan berhitung.

Secara historis, masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Jember adalah penduduk migran yang berasal dari Jawa dan Madura. Pada awalnya migrasi ini didorong oleh faktor pertumbuhan industri perkebunan yang ada di Jember. Selain itu Kabupaten Jember merupakan daerah yang mengalami perkembangan cukup pesat khususnya dibidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari sumber penghidupan. Namun demikian, mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, disamping masih dijumpai suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan komposisi penduduk dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan (*migrasi*). Untuk itu komposisi penduduk berdasarkan data

registrasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, jumlah penduduk Kabupten Jember tercatat sebanyak 2.329.929 jiwa, terdiri atas 1.186.163 jiwa perempuan dan 1.143.766 jiwa laki-laki. Adapun laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 sampai dengan 2010 sebesar 0,6321.

Disisi lain, Kabupaten Jember merupakan daerah penghasil tanaman perkebunan. Dimana secara geografis sebagian besar tanaman perkebunan terdapat di Kecamatan Silo yang merupakan penghasil tanaman kopi terbesar di Kabupaten Jember. Menurut data yang dihimpun BPS 2011 tanaman kopi yang dihasilkan sebesar 11.643,43 Kuintal. Penghasil Kopi terbesar terdapat di PDP Sumberwadung. Namun demikian, kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah PDP Sumberwadung masih tergolong miskin dibandingkan daerah lain yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang masih tergolong prasejahtera karena alasan ekonomi sebanyak 834 rumah tangga dan alasan bukan ekonomi sebanyak 249 rumah tangga, sedangkan keluarga yang tergolong keluarga sejahtera I sebanyak 1.192 keluarga, keluarga sejahtera II sebanyak 830, keluarga sejahtera III sebanyak 73, dan keluarga sejahtera III + sebanyak 9.

Secara mayoritas masyarakat di PDP Sumberwadung menjadi buruh perkebunan. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sumber daya manusia (SDM) PDP Sumberwadung masih tergolong relatif rendah dibandingkan daerah lain yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Jember. Hal ini tampak dari jumlah warga tributa sebanyak 115 jiwa.

Kabupaten Jember merupakan daerah agraris. Meskipun sektor perkebunan di Kabupten Jember merupakan penyangga utama perekonomian, tetapi peran tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun secara perlahan tetapi pasti. Hal ini dapat dilihat dari perubahan peran sektor pertanian di tahun 2010 dan tahun 2011, bahwa peranan sektor perkebunan sebesar 45,09 persen dan 44,71%, selanjutnya dapat dilihat dari hasil observasi banyak perusahaan perkebunan yang telah mengubah tanaman perkebunan menjadi tanaman pertanian.

Selain itu, di struktur sosial masyarakat di PDP Sumberwadung sama dengan daerah perkebunan lainnya. Di situ terdapat beragam lapisan sosial masyarakat, yaitu: buruh, karyawan, dan elit perkebunan yang terdiri dari (mandor, sinder, dan manager). Lapisan sosial tersebut secara langsung berdampak pada kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial masyarakat.

Mengingat, struktur sosial tersebut dapat membatasi berbagai akses yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Silo yang tinggal di komunitas PDP Sumberwadung relatif sangat rendah. Bahkan masih banyak ditemukan masyarakat yang belum pernah mendapatkan layanan pendidikan formal. Akibatnya, produksi hasil perkebunan tidak mengalami peningkatan. Bahkan produksi perkebunan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga disebabkan oleh sulitnya sarana transportasi maupun sarana pendidikan di daerah perkebunan. Mengingat daerah perkebunan merupakan daerah yang terisolasi dan jauh dari berbagai akses pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan di bidang pendidikan di daerah perkebunan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Seiring dengan semangat tersebut program pendidikan nonformal sangat tepat untuk diterapkan pada masyarakat perkebunan. Salah satu program tersebut adalah pendidikan keaksaraan yang bertujuan memberikan bekal kepada masyarakat dalam mengenal angka dan huruf sebagai bekal mendapatkan pengetahuan dasar.

Kelembagaan masyarakat lokal dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai wadah menjalankan program pendidikan keaksaraan fungsional adalah organisasi Serbuk. Organisasi tersebut merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat perkebunan melalui bantuan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat perkebunan, dalam hal sosial politik. Selain itu, hasil identifikasi ditemukan keberadaan Organisasi serbuk memberikan ruang gerak perempuan melakukan berbagai aktivitas yang sama terhadap perempuan maupun laki-laki diranah domestik dan publik. Perempuan dilibatkan melakukan aktivitas sosial. Kondisi ini merupakan langkah awal untuk membuka wawasan masyarakat di perkebunan yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi tersubordinat.

C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat dan memiliki potensi untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dan laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender di ranah publik dan domestik.

2. Saran

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya peran pemangku kepentingan yang tergerak untuk melakukan aksi dalam mengentaskan kemiskinan, tidak seharusnya mengabaikan karakteristik masyarakat di tingkat lokal. Karakteristik tersebut telah melembaga dan menjadi sistem sosial di tingkat masyarakat lokal. Ekspektasi yang diharapkan dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat dalam kajian akademis maupun bagi perencanaan pembangunan masyarakat untuk memadukan antara pendidikan keaksaraan, pengetasan kemiskinan dan program pemberdayaan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Amin. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Andrijani. 2003. *Analisis Gender dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Dalam Perenpuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*. Bandung: Akatiga.
- Cleves, J. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Pers.
- Ife dan Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London: The Guilford Press.
- Mahardika, T. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Narayan, D. 2005. *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspective*. Washington DC: The Word Bank.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London: The Gullford Press.

- Ritzer dan Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Utama.
- Sariono. 2002. "Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Manggarai Propinsi NTT." *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Singarambun dan Effendi. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Smith, W. 2008. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sudin. 2006. "Peningkatan Kapasitas Sosial Perempuan melalui Kelompok UEP di Kecamatan Pulau Ternate." *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokrowinoto, M. 2005. *Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Wrihatnolo dan Nugroho. 2007. *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Zubaidi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media Group.